

Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana

Taupiq Rahman¹, Pasrun Adam², Abd. Razak³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari

Correspondence		
Email: Chevard@gmail.com	No. Telp: 082259117979	
Submitted: 12 Oktober 2023	Accepted: 21 Oktober 2023	Published: 22 Oktober 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Kawasan dan Kasubag. Umum dan Kepegawaian dan Staf Admin LAKIP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dilihat dari Indikator Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Kinerja sudah optimal namun pada Indikator Pengukuran Kinerja belum optimal karena tidak dilakukan monitoring capaian kinerja secara berkala.

Kata kunci: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja

Pendahuluan

Perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik (Iqbal Mustofa, 2012). Terkait dengan masalah akuntabilitas di Indonesia, menurut Wahyudi Kumorotomo (2010) ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kinerja kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Beberapa hal tersebut ialah membahas terkait dengan *administrative accountability* dan *professional accountability*, isu pokok yang muncul adalah buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2014 (Birokrasi, 2014) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penerapan konsep *New Public Management* (NPM) di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Hughes, 1998 dalam Mahmudi, 2010). Penerapan *New Public Management* (NPM) di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat itu yaitu adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek *input* tanpa melihat tingkat *output* maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar (Nunik,2012).

Dampak dari permasalahan tersebut adalah sulitnya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang baik dan benar, karena akan berdampak pada penentuan indikator kinerja yang akan digunakan dalam dokumen LAKIP. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu dari Akbar et al (2010) mengenai *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*, bahwa penyusunan laporan kinerja lebih disebabkan karena adanya peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk membuatnya bukan karena kesadaran akan arti pentingnya laporan itu bagi keberadaan institusi pemerintah yang bersangkutan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dibuat oleh Barreto (2006) dalam Akbar et al. 2010) yang mengatakan bahwa indikator kinerja yang dibuat oleh organisasi tidak memiliki pengaruh yang berarti pada operasi internalnya karena hanya dibuat lebih banyak untuk mematuhi regulasi yang memang harus ditaati. Dengan kata lain semua itu dilakukan untuk memenuhi keperluan formal bukan substansial. *It's simply to conform not to perform.*

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Penerapan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2010, bahwa perbaikan *government* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi hasil (*outcome*) dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja organisasi. Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja tersebut dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Pada tahun 2021, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana memperoleh nilai 73,31 dengan predikat “BB” yang diinterpretasikan sangat baik. Bila kita membandingkannya dengan hasil evaluasi yang diterima Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana pada tahun 2022 yang memperoleh nilai 61,07 dengan predikat “B” yang diinterpretasikan baik, maka dapat dilihat adanya penurunan dari hasil evaluasi atas AKIP pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP tersebut, terdapat beberapa hal yang menunjukkan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten, diantaranya kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar, adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras, belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja, masih belum tersosialisasikannya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas serta adanya keterbatasan kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sinaepon, dkk (2022) yang menemukan bahwa penerapan LAKIP sudah baik dan sudah dapat dikatakan sesuai dengan PP RI Nomor 29 Tahun 2014, komitmen bersama dari pegawai dan juga masing-masing bagian dalam melaksanakan setiap tanggung jawab menjadi faktor keberhasilan dari penerapan LAKIP ini. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Deviani, dkk (2022) menyimpulkan bahwa Penerapan LAKIP belum terlaksana secara optimal dikarenakan terdapat 3 (tiga) prinsip *Good Governance* yang belum tercapai dalam penerapannya yaitu membangun konsesus, responsif dan kesetaraan. Maka dari itu, diperlukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk merumuskan penelitian yang berjudul Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Sedangkan menurut Sugiyono (2016) ‘metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada realitas, digunakan pada kondisi objek yang alamiah, serta peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengelompokan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan realitas nyata dari penalaran’.

Penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah ataupun fenomena yang buatan manusia. Fenomena ini bisa berbentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lain (Sukmadinata, 2006;72).

Penelitian ini di laksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bombana. Adapun dasar pertimbangan melakukan penelitian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana karena melihat masih minimnya kemampuan dalam sumber daya aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana untuk mengimplementasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada Miles & Huberman (2014) bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara tatap muka dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh”. Beberapa

aktifitas dalam analisis data, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

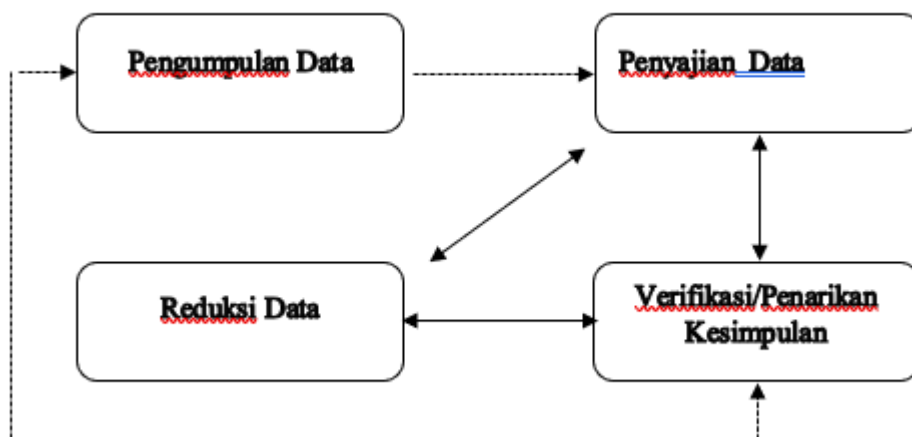
2. Penyajian Data

Display data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian diperoleh.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan menurut Miles & Huberman (2014) merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan merupakan gagasan baru yang berasal dari temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas, namun setelah diteliti menjadi jelas. Dalam penelitian ini, model penyajian data yang digunakan adalah model narasi.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada skema 1 berikut :



Skema 1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Hasil dan Pembahasan

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan

agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan ketentuan Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara tentang perencanaan kinerja, dapat disimpulkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dalam menyusun perencanaan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran dinas menggunakan dokumen RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2022, dan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun sebelumnya. Penggunaan dokumen RPJMD dan Renstra Dinas dimaksudkan untuk melihat keselarasan Program dan Kegiatan yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, sedangkan penggunaan dokumen LAKIP tahun sebelumnya dimaksudkan untuk mengetahui program dan kegiatan apa saja yang belum mencapai target untuk kemudian dilakukan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan kinerja dinas.

Sasaran/Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana selama jangka menengah, yaitu 1 (Satu) Tahun Anggaran sampai dengan 5 (Lima) Tahun kedepan (2017-2022) sesuai dengan Visi Misi Bupati / Wakil Bupati terpilih dan RPJMD Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2018-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Akses KK miskin terhadap rumah layak huni	Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni	64,20%	73,15%	82,10 %	91,05%	100%
2.	Meningkatnya Akses KK miskin terhadap energi listrik	Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik	74,40%	80,03%	86,18 %	92,83%	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	A	A

Sumber : Data Sekunder, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Adapun Rencana kinerja/indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Rencana Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Akses KK miskin terhadap rumah layak huni	Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni			100%
			Program Pengembangan perumahan	Persentase penurunan backlog perumahan	0 %
			Program Kawasan Permukiman	Persentase KK Miskin dikawasan kumuh yang ditangani rumahnya	17,98%
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani rumahnya	3 Kawasan
2.	Meningkatnya Akses KK miskin terhadap energi listrik	Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik	Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat hak milik	20,1462%
			Program Peningkatan Prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Persentase peningkatan rumah tangga miskin pengguna listrik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP			A
			Program Pelayanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten /kota	100%

Sumber : Data Sekunder, Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2022.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang lengkap, unit kerja dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pengukuran kinerja, dapat disimpulkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dalam melakukan pengukuran kinerja belum maksimal. Hal ini disebabkan dalam proses pengelolaan data kinerja terdapat kendala seperti belum adanya SOP yang jelas tentang pengumpulan data kinerja, dalam proses pengumpulan data kurang efektif karena pengumpulan datanya masih manual, dan pengukuran kinerja tidak dilakukan secara berkala. Pada proses pengukuran hanya menggunakan sumber data yang berasal dari internal yang menyebabkan tidak adanya pembandingan antara capaian kinerja dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Berikut ini kami sajikan capaian kinerja dan capaian keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2022.

Tabel 4
Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bombana Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1.	Meningkatnya Akses KK miskin terhadap rumah layak huni	Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni	100%	107,86%	107,86%
2.	Meningkatnya Akses KK miskin terhadap energi listrik	Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik	100%	105,24%	105,24%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP	A (81)	BB (73,31)	90,51 %

Sumber: Data Sekunder, Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2022

Tabel 5
Realisasi Capaian Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bombana Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1.	Meningkatnya Akses KK miskin terhadap rumah layak huni	Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni	4.634.971.000,00	4.607.071.600	99,40%
2.	Meningkatnya Akses KK miskin terhadap energi listrik	Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik	1.891.773.050,00	1.891.404.900,00	99,98%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP	2.984.072.803,00	2.917.318.823,00	97,76 %

Sumber: Data Sekunder, Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2022

3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur kedepannya. Evaluasi harus sering dilakukan agar masalah yang di hadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik. Berdasarkan hasil wawancara tentang Evaluasi kinerja, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dalam melakukan evaluasi kinerja telah optimal. Hal ini didasarkan dalam melakukan evaluasi kinerja, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten menggunakan hasil perhitungan pencapaian dari setiap indikator kinerja. Dari hasil perhitungan pencapaian ini dapat diketahui mana indikator kinerja yang berhasil dan mana yang gagal yang kemudian dilakukan analisa efisiensi tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa terhadap efisiensi penggunaan dana dalam pencapaian kinerja. Hasil dari evaluasi kinerja ini digunakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertahanan Kabupaten Bombana dalam perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang datang dan juga menjadi ukuran keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dalam tugas dan fungsinya sebagai OPD penyelenggara kebijakan di bidang perumahan.

Dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dapat disimpulkan bahwa :

1. Untuk indikator Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni dapat dikatakan berhasil dikarenakan pencapaian kinerjanya sebesar 107,86% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar 99,40%
2. Untuk indikator Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik dapat dikatakan berhasil dikarenakan pencapaian kinerjanya sebesar 105,24% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar 99,98%
3. Untuk indikator Hasil Evaluasi SAKIP dapat dikategorikan tidak berhasil dikarenakan pencapaian kinerjanya sebesar 90,51%, sedangkan capaian anggarannya 97,76%

Kesimpulan

1. Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dilihat dari Indikator Perencanaan Kinerja secara keseluruhan telah optimal hal ini dilihat dari keselarasan antar dokumen perencanaan kinerja dinas dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dinas dan dokumen RPJMD Kabupaten Bombana.
2. Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dilihat dari Indikator Pengukuran Kinerja belum optimal dikarenakan tidak melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala minimal 3(tiga) kali dalam setahun. Selain itu juga sumber data kinerja yang digunakan cuman menggunakan data internal dari dinas.
3. Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dilihat dari Indikator Evaluasi Kinerja telah optimal hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja dinas dan pemanfaatan hasil evaluasi terhadap perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Saran

1. Sebaiknya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana membuat pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai acuan penyusunan kedepannya.
2. Dalam hal pengukuran kinerja, sebaiknya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana :
 - a. Pengumpulan datanya di buatkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - b. Selain menggunakan sumber data internal, baiknya menggunakan data external untuk melihat perbandingan capaian kinerjanya.
 - c. Perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit SKPD yang bertanggung jawab dalam pencatatan kinerja.
 - d. Monitoring capaian kinerja sebaiknya dilaksanakan secara berkala minimal 3 (tiga) kali dalam setahun.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya :

- a. Agar melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif atau menggunakan *mixed method* terkait 3 (tiga) indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Agar melakukan pengembangan penelitian yang melihat kesesuaian capaian kinerja dalam LAKIP dengan kondisi capaian di lapangan

REFERENSI

- Abdul, Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama , Salemba empat, Jakarta.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- A.F Stoner, 2013, Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia.Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.
- AR. Mustopadidjaya (2002), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta:LAN
- Barreto, H., & Howland, F. M. (2006). Introductory Econometrics: Using Monte Carlo Simulation with Microsoft Excel. New York: Cambridge University Press.
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama.
- Buyung, P. (2021). Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat 2020. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- Demi Alo Sinulingga . (2022). Efektivitas Penyusunan LAKIP Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Dessler, Gary. 2019. Manajemen SDM : buku 1. Jakarta: Indeks.
- Daft. 2010. Era Baru Manajemen. Jilid 1. Edisi ke Sembilan Salemba Empat. Jakarta
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review. Journal. Vol.14, No.1, 57-74.
- Endang Tri Pratiwi, Dewi Mahmuda, Ernawati Malik. (2022). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Baubau (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kota Baubau)
- Enditya Luhur Raharja, Lukman M Baga, A Faroby Falatehan. (2018). Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor
- Ferdeline Lunga Nani, Hyronimus Rowa, Ani Martini. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur
- Flippo, E. B. (2005). Manajemen Personalialia. Edisi Keenam, Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo.
- Griffin, Ricky W., and Moorhead, Gregory., 2014. Organizational Behavior: Managing People and Organizations. Eleventh Edition. USA: South Western.
- Handoko, T. Hani. 2013. Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia Edisi kedua. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, Malayu. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Instansi Pemerintah.
- Ivancevich, John M., et al., 2014. Organizational Behavior and Management. 10th Edition. New York: McGraw-Hill Education.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah. Negara Republik Indonesia
- Ihyaul Ulum, 2005, Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik , UMM Press: Malang.

- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensen-meckling-76.pdf>.
- Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C., & He, H. (2020). *Principles of Marketing Eight European Edition*. UK : Pearson
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- L. Mathis, Robert & H. Jackson, John. 2011. *Human Resource Management* (edisi 10). Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* (edisi Revisi 2008). Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Marjuni, Sukmawati., 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar: CV. Sah Media.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Moleong Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja, hal 11
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustofa Anies Iqbal, 2012. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang.
- Muh. Irfandy Azis. 2020. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ekonomika*, 11(1). E-ISSN: 2685-2977.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mathis, Robert L. dan John H. Jackson. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nawawi, Hadari, 2011, *Manajemen Sumber Daya manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noe et al, 2011, *Human Resource Management, Gaining Competitive Advantage 3rd Edition*. McGraw-Hill.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bombana
- Peraturan Bupati Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

- Peraturan Bupati Kabupaten Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
- Priyono. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Surabaya: Zifatama Publisher
- Purnaya, I Gusti Ketut. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi
- P. Robbins, S., & A. Judge, T. (2017). Organizational Behaviour. Harlow: Pearson Education Limited.
- Ria, Ristyana. (2020). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- Riduwan. 2010. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta
- Sri, Larasati. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama.. Cetakan Pertama. CV. Budi Utama: Yogyakarta
- Sutrisno, E. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana .
- Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2016. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Schermerhorn, John R. (2012). Exploring Management, 3th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Sembiring, M. 2012. Budaya dan Kinerja Organisasi. Bandung: Penerbit Fokus Media. 132 hal.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Yogyakarta: BPFE.
- Windi Pratiwi. 2022. Pengaruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara
- Wiersma William, “Trianggulasi”, dalam Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta, 2010.